



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 811/IV/2014

III/APRIL 2014



Dewan Antusias Gunakan Hak Pilihnya



LENSA PEMILU 2014

Para tokoh masyarakat saat menggunakan hak pilihnya.



PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI | **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dr. Winantungtyastiti, M. Si (**Sekretaris Jenderal DPR-RI**) | **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum | **PIMPINAN PELAKSANA:** Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan) | **PIMPINAN REDAKSI:** Dadang Prayitna, S.IP. M.H. (**Kabag Pemberitaan**) | **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Dra. Tri Hastuti (**Kasubag Penerbitan**), Mediantoro **SE** (**Kasubag Pemberitaan**) | **REDAKTUR:** Sugeng Irianto, S.Sos; M. Ibnur Khalid; Iwan Armanias; Mastur Prantono | **SEKRETARIS REDAKSI:** Suciati, S.Sos ; Ketut Sumerta, S. IP | **ANGGOTA REDAKSI:** Nita Juwita, S.Sos ; Supriyanto ; Agung Sulistiono, SH; Rahayu Setiowati ; Muhammad Husen ; Sofyan Effendi | **PENANGGUNG JAWAB FOTO:** Eka Hindra | **FOTOGRAFER:** Rizka Arinindya ; Naefuroji; M. Andri Nurdriansyah | **SIRKULASI:** Abdul Kodir, SH | **ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA:** BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com; www.dpr.go.id/berita

Penyandang disabilitas menggunakan hak suaranya.



Suasana pencoblosan di beberapa wilayah.



**LENSA
PEMILU
2014**



Ketika Rakyat memilih.



Dewan Antusias Gunakan Hak Pilihnya

Meski dibayangi politik uang, kecurangan dan tertukarnya kartu suara serta meningkatnya golput, namun ternyata pemilu legislatif (pileg) tanggal 9 April 2014 lalu berlangsung tertib, aman dan lancar. Selain itu pesta demokrasi lima tahunan di tahun keempat era reformasi ini tingkat partisipasi pemilih cukup tinggi. Dibanding Pemilu 2009 yang berada pada angka 70,99 persen, pemilu 2014 ini mencapai 75%.

Partisipasi Pimpinan DPR, Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan dan para anggota DPR pada pemilu kali ini juga perlu mendapat apresiasi. Berdasarkan pemantauan langsung ke beberapa lokasi TPS di Jakarta dan sekitarnya, Ketua DPR Marzuki Alie menggunakan hak suaranya di TPS 090 Gading Griya Lestari, Blok G/5, RT 006/009, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Irgan Chairul Mahfiz, caleg PPP dari dapil Banten III (Tangerang) menggunakan hak pilihnya di TPS 51, Kelurahan Kelapa Dua, Tangerang. Irgan mengatakan kondisi sekarang terasa berat bagi caleg DPR RI. Pendekatannya sangat pragmatis dan transaksional. "Tidak cukup dengan menyampaikan visi dan misi, perlu ada pendekatan pragmatis. Nah, ini yang cukup melelahkan bagi kita," jelas Irgan.

Sementara Wakil Ketua BKSAP Andi Azhar Cakra Wijaya melakukan pencob-



blosan di TPS 025 Cililitan, Kramatjati, Jakarta Timur. Ia mengatakan, yang terpenting dalam perjalanan pelaksanaan Pemilu khususnya pada pemilihan anggota legislatif adalah disosialisasikannya pendidikan politik yang mendorong kesadaran dan partisipasi langsung masyarakat.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Dimiyati Natakusumah melakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) No.49 Kelurahan Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat

"Saya pribadi melihat animo warga

saat ini sepertinya menurun. Mungkin ini disebabkan karena sosialisasi penyelenggaraan Pemilu agak terlambat. Tapi secara umum saya melihatnya masih oke," ujar Dimiyati didampingi isterinya Irna Narulita.

Anggota Komisi V DPR RI, Wardhatul Asriah sempat menyesalkan terjadinya kasus surat suara yang tertukar di beberapa wilayah Indonesia, termasuk di salah satu TPS di Kabupaten Bekasi yang merupakan Dapilnya, Jawa Barat VII. Untungnya kesalahan dapat segera teratasi sehingga pemilu ulang dapat dilakukan hari itu juga.

Dari Pimpinan Setjen DPR, Wakil Sekjen Achmad Djuned mengapresiasi pelaksanaan Pemilu legislatif yang berlangsung lebih tertib jika dibandingkan dengan Pemilu tahun 2009. Tertib dan lancarnya pemilu kali ini diawali pada saat kampanye yang sebelumnya dilakukan secara terbuka, sekarang sudah mulai dikurangi.

"Partai-Partai berkampanye banyak yang menggunakan model dengan menyampaikan program secara tertutup, sehingga membuat kampanye menjadi lebih tertib," jelas Wakil Sekretaris Jenderal DPR Achmad Djuned, usai menggunakan hak suaranya di Tempat Pemilihan Suara (TPS) 046 Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. (mp)

Pemilu Dipenuhi Politik Uang

Pemilihan Umum tahun ini, dinilai terjadi banyak politik uang. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie usai menggunakan hak suaranya di TPS 090 Gading Griya Lestari, Blok G/5, RT 006/009, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

"Pemilu ini masih memprihatinkan, banyaknya praktek-praktek politik uang. Saya sampaikan kepada calon pemilih, jangan pilih orang yang telah membayar, jangan pilih orang yang telah memberikan sembako. Pada akhirnya, yang dirugikan adalah masyarakat. Mudah-mudahan pesan moral

yang banyak disampaikan oleh Caleg ini dapat mempengaruhi sikap pemilih yang mungkin tadinya terpengaruh politik uang, kemudian dengan adanya pesan moral ini, dia akan kembali kepada hati nuraninya," ujar Marzuki, Rabu (9/04).

Terkait dengan angka golput, Marzuki menilai hal ini sebagai bukti kekecewaan terhadap calon pemimpin mereka. Namun, kecewa itu harusnya bukan malah golput, tetapi berpartisipasi.



Ketua DPR RI Marzuki Alie usai mencoblos di TPS 090 Gading Griya Lestari, Cilincing.

“Golput ini terjadi karena kekecewaan. Harusnya, kekecewaan ini diobati dengan berpartisipasi lebih positif, untuk memilih orang-orang yang dianggap akan amanah pada saat duduk di lembaga legislatif. Justru malah jangan dibiarkan, karena jika dibiarkan, orang-orang ini yang memang selalu mencederai rasa keadilan bagi masyarakat, akan kembali menjabat di DPR,” tambah Politisi Demokrat ini.

Untuk itu, jika masyarakat ingin memperbaiki negeri ini, jangan melakukan golput. Turut menggunakan hak pilihnya, sehingga dapat mewakili aspirasi dari masyarakat.

“Kalau kita kecewa, kita harusnya berbuat, ikut berkontribusi, turut menggunakan hak suara dan hak pilihnya, untuk menentukan yang terbaik caleg yang akan menjabat di lembaga legislatif. Mudah-mudahan pilihan itu tidak salah. Lima tahun ke depan kita mendapatkan calon legislaif yang betul-betul mewakili masyarakat. Kita harapkan, partisipasi publik juga lebih baik dari Pemilu sebelumnya,” imbuhnya. (sf) foto: sofyam/parole/hr.

Kondisi Pemilu Kali Ini Lebih Berat

Kondisi Pemilu 2014 kali ini dirasa jauh lebih berat daripada Pemilu 5 tahun sebelumnya. Pragmatisme dan transaksional begitu masif terjadi. Setidaknya inilah yang dirasakan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Irgan Chairul Mahfiz, caleg PPP dari dapil Banten III (Tangerang).

Ditemui di kediamannya, Komplek Perumahan Villa Ilhami, Islamic Village, Tangerang, Rabu (9/4), Irgan mengatakan, masyarakat pemilih tidak cukup mendengarkan visi misi caleg, harus ada pendekatan pragmatis lanjutan. Inilah yang memberatkan para caleg.

“Kondisi sekarang terasa berat bagi caleg DPR RI. Pendekatannya sangat pragmatis dan transaksional. Oleh karenanya, bagi caleg sangat memberatkan. Jadi, tidak cukup dengan menyampaikan visi dan misi, perlu ada pendekatan pramatis. Nah, ini yang cukup melelahkan bagi kita,” terang Irgan, usai mencoblos di TPS 51, Kelurahan Kelapa Dua, Tangerang.

Bila dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya, Pemilu kali ini dirasa kurang meriah. Tapi, ketidakmeriahan itu belum tentu berkorelasi dengan tingkat partisipasi masyarakat pemilih. “Bisa jadi mereka dalam posisi tidak mau terlibat kampanye terbuka. Kita belum tahu persis kecenderungan pemilih, apakah mereka datang ke TPS atau tidak. Kalau rame-rame datang ke TPS berarti tingkat partisipasi semakin tinggi, walau tidak mengikuti kampanye terbuka.”

Masyarakat pemilih sekarang, nilai Irgan, sudah lebih cerdas dalam memilih wakil-wakilnya. Mereka tak perlu ikut eforia kampanye. Namun, di sisi lain, bila di beberapa daerah ada yang tidak antusias datang ke TPS, itu berarti masyarakat sudah jenuh dengan dunia politik. Masyarakat seperti ini merasa hanya dimanfaatkan untuk kampanye 5 tahunan saja dan mendengarkan janji-janji politik para caleg.



Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz dan isteri memasukkan surat suara dalam kotak.

Dalam konteks kejenuhan masyarakat, maka menjadi kewajiban para caleg terutama caleg petahana untuk meyakinkan masyarakat pemilih agar ikut serta dalam setiap kali perhelatan Pemilu. “Kita harus terus menerus merawat para konstituen. Meyakinkan bahwa melakukan pemilihan ini untuk kepentingan bersama dan negara. Pemilihan caleg ini bukan pemilihan individual. Kewajiban anggota DPR untuk terus meyakinkan masyarakat bahwa ini penting. Jangan tidak terlibat,” harap Irgan.

Ditanya soal peluangnya untuk terpilih kembali, Irgan menyatakan optimis dirinya bisa terpilih kembali. “Insyallah kalau saya melihat antusiasme masyarakat. Kalau saya lihat dukungannya, saya kira ini bisa menggerakkan suara yang signifikan bagi saya. Insyallah saya optimis,” aku Irgan. (mh) foto: husen/parole/hr.

Pemilu Jadi Ajang Pembelajaran Politik Masyarakat



Wakil Ketua BKSAP DPR, Andi Azhar Cakra Wijaya mendaftarkan pada panitia TPS.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Andi Azhar Cakra Wijaya menilai lebih dari sembilan puluh persen masyarakat yang ia temui saat masa kampanye di Dapilnya, DKI Jakarta I tidak tahu tugas dan fungsi dari DPR. Hal tersebut disampaikan kepada Parle, Rabu (9/4) usai menggunakan hak suaranya di TPS 025 Cililitan, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur.

“Saya turun di 224 RW se-Jakarta Timur. Kurang lebih 90 persen dari masyarakat disana tidak tahu tugas dan fungsi

DPR. Itu yang membuat saya kaget. Ternyata dalam benak mereka seolah-olah anggota legislatif itu bergelimang uang, tidak ada kerjanya dan santai-santai saja,” ungkap Politisi dari Fraksi PAN.

Oleh karena itu selama sebulan penuh ia berkampanye, Andi Azhar tidak hanya mensosialisasikan visi dan misi pribadi serta partainya. Ia juga berusaha untuk memberikan pelajaran politik ke masyarakat, terutama terkait tugas dan fungsi DPR, seperti fungsi legislasi dengan membuat UU, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran atau *budgeting*.

Ditambahkannya, yang terpenting dalam perjalanan pelaksanaan Pemilu khususnya pada pemilihan anggota legislatif adalah disosialisasikannya pendidikan politik yang mendorong kesadaran dan partisipasi langsung masyarakat dan mengerti setiap tahap prosesnya.

“Masyarakat harus meningkat *politic awarenessnya*, bisa berupa memberi dukungan atau menyampaikan aspirasinya dalam bentuk kontak, hubungan langsung kepada calon legislatif atau partai politik. Karena di masa mendatang, membangun bangsa dan negara ini penguatannya memang dari DPR dengan produk undang-undang berkualitas, pengawasan yang berkualitas, serta penganggaran pembangunan yang lebih berkualitas dan terprogram” tambahnya. (Ray) foto: ray/parle/hr.

Perlu Penerapan E-Voting Pada Pemilu Mendatang

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Dimiyati Natakusumah menilai penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2014 ini *grade* nya menurun. Hal tersebut terungkap sesaat sebelum dirinya melakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) No.49 Kelurahan Sukabumi Utara Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, Rabu pagi (9/4).

“Saya pribadi melihat animo warga saat ini sepertinya menurun. Tidak sebanyak 5 (lima) tahun yang lalu, jika pada pemilu yang lalu jam 11 pagi orang sudah berduyun-duyun dan proses pencoblosan hampir selesai, tapi pada kali ini baru 164 orang dari sekitar 332 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada. Mungkin ini disebabkan karena sosialisasi penyelenggaraan Pemilu agak terlambat. Tapi secara umum saya melihatnya masih oke,” ujar Dimiyati didampingi isterinya Irna Narulita.

Lebih lanjut, politisi asal Partai Persatuan Pembangunan ini juga menyoroti penggunaan kotak suara yang hanya berbahan dasar kardus. Selain bahannya yang tak tahan air bila terkena hujan deras, surat suara yang tersimpan di



Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Dimiyati Natakusumah.

dalamnya perlu pengamanan ekstra. “Mudah-mudahan cuaca bersahabat terutama untuk daerah-daerah terpencil. Saya berharap Pemilu yang akan datang persiapannya akan lebih baik lagi,” ungkap Dimiyati.

Melihat kenyataan di lapangan tersebut, politisi yang juga mantan bupati Pandeglang tersebut mengusulkan penerapan e-voting pada Pemilu yang akan datang. Salah satu alasan perlunya e-voting adalah untuk meminimalisir terjadinya berbagai kecurangan.

“Pemilu mendatang perlu dicoba teknologi e-voting agar pemilu bisa berlangsung lebih efektif dan efisien. Namun demikian, e-voting bergantung pada kejujuran mesin juga, apakah ini bisa diterima oleh orang-orang awam dan ini butuh waktu. Saya melihat semakin maju teknologi maka akan lebih bagus tidak tradisional lagi. Pemilihan kali ini saya melihat cukup menyulitkan bagi orang yang kenal wajah tapi

tidak hafal nama lengkap (aslinya). Apalagi di Indonesia ini banyak orang terkenal dengan nama panggilan (nickname),” jelas Dimiyati.

Terkait praktek kampanye hitam (*black campaign*) menurut Dimiyati hal tersebut sepertinya tidak dihiraukan oleh masyarakat. Menurutnya, justru praktek *money politics* makin gencar dan membudaya, ini kurang bagus bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Praktek ini harus ditertibkan, bagaimana orang terpilih itu karena kualitas personalnya, bukan orang tersebut dipilih karena *money politics* atau suap, ini harus menjadi perhatian kita semua. “Dan yang dipilih itu harus orang yang bermanfaat dan punya sumbangsih bagi bangsa ini dan bersikap negarawan. Jangan sampai orang yang terpilih hanya karena punya banyak uang ini bisa menjadi preseden buruk,” pesan Dimiyati. (od) foto: [naefurodjie/parle/hr.](#)

Wasekjen DPR Apresiasi Pemilu 2014 Yang Berlangsung Tertib dan Aman

Wakil Sekjen DPR Achmad Djuned mengapresiasi pelaksanaan Pemilu legislatif Rabu (9/4) yang berlangsung lebih tertib jika dibandingkan dengan pemilu tahun 2009. Tertib dan lancarnya pemilu kali ini diawali pada saat kampanye yang sebelumnya dilakukan secara terbuka, sekarang sudah mulai dikurangi.

“Partai-Partai berkampanye banyak yang menggunakan model dengan menyampaikan program secara tertutup, sehingga membuat kampanye menjadi lebih tertib,” jelas Wakil Sekretaris Jenderal DPR Achmad Djuned, usai menggunakan hak suaranya di Tempat Pemilihan Suara (TPS) 046 Maruya Selatan, Kembangan Jakarta Barat, Rabu (9/4) pagi.

Secara umum pelaksanaan pemungutan suara di wilayah DKI termasuk Meruya Selatan yang didalamnya terdapat Komplek Perumahan Karyawan Setjen DPR berjalan tertib dan lancar. Sejak pukul 07.00 masyarakat berbondong-bondong mendatangi TPS dan sekitar pukul 12.00 pemungutan suara sudah selesai.

Sekali lagi Wasekjen DPR menyambut baik pemilu sekarang betul-betul pemilu yang aman, damai dan tidak anarkis, karena hal ini merupakan proses tahapan yang nantinya berakhir pada saat pelantikan anggota DPR, DPD pada 1 Oktober mendatang.

Ia juga melihat bahwa masyarakat sekarang memang sudah cerdas sehingga mereka tidak akan terjebak dengan hal-hal seperti penyuapan uang, sebaliknya mereka tetap pada pendirian serta keyakinannya.

Lebih lanjut Achmad Djuned mengatakan, dari seratus delapan puluh juta lebih pemilih pada pileg kali ini, nantinya akan bisa menempatkan 560 anggota DPR maupun 136 anggota DPD yang lebih berkualitas. “Mudah-mudahan

kedepan para anggota DPR dan DPD duduk di Senayan bisa merealisasikan apa yang telah dia janjikan dan benar-benar bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat,” ujarnya.

Kepada warga masyarakat, dia berharap, mudah-mudahan ke depan akan lebih cerdas lagi untuk tidak terjebak kepada masalah yang sifatnya pragmatis atau politik uang. Dengan demikian, para wakil rakyat di DPR, DPRD maupun DPD bisa amanah, memperjuangkan aspirasi, jujur, bersih dan berintegritas.



Wakil Sekjen DPR Achmad Djuned saat menggunakan hak pilihnya.

Menurutnya, pemilu merupakan suatu momen yang sangat penting, karena akan berkaitan dengan masa depan bangsa Indonesia. “Mereka datang ke Senayan seharusnya bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, termasuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Jangan sampai ketika kampanye mengobral janji, namun setelah duduk di Senayan lupa pada janjinya,” pesan Achmad Djuned. (Spy), foto: [supriyanto/parle/hr.](#)

Seruan Tolak Politik Uang dari Masjid Baiturrahman DPR



Suasana Pengajian Akbar "Damai Indonesiaku" di Masjid Baiturrahman DPR.

Anggota Komisi VI DPR RI Primus Yustisio mendukung kampanye Tolak Politik Uang dalam Pemilu 2014 yang disampaikan Ustad Arifin Ilham dalam Pengajian Akbar Damai Indonesiaku. Ia menyebut memberikan mandat kepada Calon Anggota Legislatif karena sogokan hanya akan membuat mereka berubah ditengah jalan.

"Saya setuju sekali dengan seruan Ustad Arifin menolak sogokan. Pemimpin, Caleg menarik simpati dengan cara yang diharamkan hanya akan

membuat mereka berubah ditengah jalan," katanya disela-sela acara yang berlangsung di Mesjid Baiturrahman, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4/14).

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat V ini mengajak segenap pihak dapat berpartisipasi dalam Pemilu Legislatif dengan memilih kandidat terbaik berdasarkan rekam jejak mereka. Artis yang telah membintangi sejumlah film layar lebar ini meyakini suara yang diberikan dengan penuh

keikhlasan pada akhirnya akan berbuah baik bagi bangsa ini.

Dalam Pengajian Akbar yang diselenggarakan kerja sama Korpri Setjen DPR dengan TV One, Ustad Arifin Ilham berulang kali menekankan pentingnya bangsa ini menolak politik uang yang nota bene adalah uang sogok. Ia memimpin bersama hadirin dan sejumlah tokoh partai mendendangkan seruan menolak *money politic* dalam pemilu nanti.

"Penyogok dan yang disogok serta perantaranya masuk neraka jahanam..," kata ustad kharismatis yang seperti biasa berceramah dengan baju gamis putihnya. Ia mengingatkan neraka jahanam bagi siapapun yang terlibat dalam tindak penyogokan tegas diatur dalam hadis yang sah.

Secara khusus ia menggoda sejumlah perwakilan partai yang menurutnya bersuara tidak selantang para jamaah yang hadir dalam pengajian tersebut. "Ayo yang dari partai seperti ini masih kurang ikhlas dalam bersuara," candanya.

Turut hadir dalam acara masa tenang pemilu ini diantaranya Aburizal Bakrie (Ketum Partai Golkar), Hidayat Nur Wahid (Capres PKS), Lukman Hakim Syaifuddin (PPP), Drajad Wibowo (PAN), Saan Mustofa (Partai Demokrat), Rhoma Irama (Capres PKB).
(iky) foto: iw, andri, rizka/parle/hr.

Persepsi Jual Beli Suara Harus Diubah Titip Suara

Wakil Ketua DPR Sohibul Iman menegaskan, masyarakat yang sudah menjadi korban beberapa kali pemilu lantaran selama ini ada persepsi yang keliru. Bahwa hubungan anggota Dewan dengan wakilnya itu transaksional, wakilnya butuh suara semen-

tara masyarakat pemilih butuh uang sehingga yang terjadi jual beli suara.

Saat wawancara dengan TV Parlemen di Jakarta, Selasa (8/4), Sohibul lebih lanjut mengatakan, dalam konteks memilih wakil-wakil rakyat,

suara itu bukan diperjualbelikan. Akibatnya begitu suara diperjualbelikan maka anggota dewan yang terpilih boleh mengapa-apakan suara itu. Sebaliknya, masyarakat tidak boleh lagi mempersoalkan bahwa wakilnya itu bekerja dengan baik atau amanah atau



Wakil Ketua DPR Sohibul Iman dalam dialog bersama TV Parlemen.

tidak.

Yang betul, kata Pimpinan DPR ini, suara itu tidak diperjualbelikan, tetapi ditiptikan. Rakyat menitiptikan

suara kepada wakilnya dan tolong digunakan secara amanah dan bisa memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat. Begitu terpilih, masyarakat berhak mengawasi suara

yang mereka titipkan itu. Kalau anggota ini sering bolos atau melakukan perbuatan tercela maka rakyat berhak mengevaluasinya.

Di bagian lain, Sohibul Iman menilai kampanye pemilu yang berlangsung dengan baik, misalnya pawai-pawai yang brutal berkurang. Tidak kurang dia menyampaikan apresiasi kepada aparat kepolisian yang telah bekerja dengan baik termasuk menilang pengendara yang melanggar aturan lalu lintas.

“Ini merupakan hal yang positif, mudah-mudahan ke depan semakin ditingkatkan. Kampanye yang baik adalah yang punya substansi bukan sekedar ugul-ugalan,” tegasnya. Ke depan, dia berharap, pemasangan baliho semakin dibatasi, karena jumlah banyak maka terkesan makin menambah kotor lingkungan. Karena itu ke depan perlu dibatasi, diiringi aturan dan sanksi yang tegas sehingga kampanye tidak menambah kekumuhan lingkungan. (as,mp)/foto:iwan armanias/parle.

KPU Harus Tindaklanjuti Pengunduran Diri Masal PPK Aceh Tengah

Jelang Pemilihan Umum Calon Legislatif 9 April 2014, setidaknya 42 Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan 107 Anggota Panitia Pemungutan Suara di Aceh Tengah mengundurkan diri secara massal.

Pengunduran diri anggota PPK dan PPS ini terjadi, menyusul adanya putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan Surat Keputusan (SK) KPU menyangkut pengesahan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah. Buntutnya, Anggota PPK dan PPS secara resmi melayangkan surat KIP Aceh Tengah pada 2 April lalu.

Menanggapi hal ini, Ketua DPR RI Marzuki Ali menyatakan Komisi Pemilihan Umum harus segera menindaklanjuti permasalahan ini. Harus dicari alasan kenapa PPK dan PPS itu mengundurkan diri.

“Saya kira KPU segera menindaklanjuti di sisa waktu ini, dengan memberikan jaminan bahwa keamanan bagi mereka itu terjamin. Itu yang lebih penting. Kenapa mereka mundur? Pasti ada ancaman, mereka tidak kuat (menghadapi ancaman itu),” ujar Marzuki di Gedung Nusantara II, Senin (7/04).

Politisi Demokrat ini yakin, dengan memberikan jaminan



Ketua DPR RI Marzuki Ali.

kepada Anggota PPK dan PPS, mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Namun ia mengingatkan, permasalahan ini harus direspon dengan cepat.

Para anggota PPK yang menyatakan mundur berasal dari Kecamatan Kebayakan, Silih Nara, Lut Tawarm Jagong Jeget, Pegasing, Bebesan, Atu Lintang, Kute Panang, Rusip, Linge, dan Kecamatan Celala. Hanya PPK dari Kecamatan Bintang dan Ketol yang tidak mengundurkan diri. (sf)/foto:andri/parle/hr.

Anggota DPR Sesalkan Banyaknya Surat Suara Tertukar



Anggota Komisi V DPR, Wardhatul Asriah.

Anggota Komisi V DPR, Wardhatul Asriah sesalkan terjadinya kasus tertukarnya surat suara di beberapa daerah, termasuk di dapilnya sendiri Jawa Barat VII yang meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta.

Hal tersebut terungkap ketika Parle, Rabu (9/4) mendatangi salah satu TPS yang merupakan bagian dari Dapil VII tempat dimana politisi dari

Fraksi PPP ini memberikan suaranya.

"Tim saya baru tahu setelah salah seorang ibu rumahtangga yang notabene merupakan pendukung saya tidak mendapati nama saya di surat suara. Dan seketika itu juga Tim saya meminta pencoblosan tersebut dihentikan sejenak," ungkap Wardha.

Setelah dilakukan penyelidikan ternyata bukan hanya nama Wardah yang tidak ada, melainkan surat suara yang tertukar dengan dapil Jawa Barat VIII, padahal daerah Kabupaten Bekasi merupakan Dapil Jawa Barat VII. Jika dibiarkan hal ini tentu akan merugikan untuk semua caleg di dua Dapil tersebut, yaitu Dapil VII dan Dapil VIII. Untungnya, hal tersebut tidak berlangsung lama alias dapat segera diatasi. Sehingga hari itu juga pemilu ulang dapat segera digelar.

Walau sudah bisa teratasi pada hari itu juga, namun kejadian seperti ini

tentu sangat mengecewakan. Karena konon hal tersebut juga terjadi di banyak daerah. Pasalnya pesta demokrasi ini hanya dilakukan sekali dalam lima tahun dan persiapannya pun sudah dilakukan sejak jauh hari.

Di kesempatan berbeda, Komisioner KPU Arief Budiman di kantornya menduga tertukarnya surat suara DPRD Kab/Kota disebabkan karena proses sortir. Dikatakannya, untuk proses sortir yaitu menyusun surat suara berdasarkan dapil dan TPS, dilakukan oleh ribuan orang yang direkrut untuk keperluan sortir saja, jadi dari ribuan orang tersebut, beberapa yang kemungkinan mengalami kesalahan.

"Kalau surat suara DPR RI, DPD, dan DPRD Provinsi yang tertukar, mungkin saja daripabrik ketika mengirimkan ke kabupaten/kota. Jadi nggak ada dari tempat lain (kecuali) setelah sortir DPRD Kab/Kota," jelas Arief. (Ayu) foto: ayu/parle/hr.

DPR Kritisi Kinerja Penyelenggara Pemilu

Pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Legislatif berlangsung beberapa saat lagi. Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman melihat masih ditemukan berbagai kekurangan yang dilakukan penyelenggara Pemilu Legislatif (Pileg) dalam persiapan pesta demokrasi ini.

"Masih banyak persoalan-persoalan yang terjadi di Pileg sebelumnya, tapi juga masih terjadi di persiapan Pileg sekarang, misalnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan distribusi logistik pemilu. Walaupun secara keseluruhan suasana menuju Pileg ini relatif lebih baik," kata Sohibul ketika ditemui di Gedung Nusantara II, Selasa (8/04).

Untuk itu, DPR akan tetap terus mengkritik kinerja Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara Pemilu, bahwa persiapan Pileg ini belum



Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman.

memuaskan. Ia meminta, agar hal-hal yang sudah terjadi pada Pemilu sebelumnya, jangan terjadi lagi.

"Kesalahan-kesalahan ini jangan sampai terjadi lagi. Kalau terjadi lagi,

kita seperti tidak pernah belajar. Kami tetap mengeritik, karena kinerjanya belum maksimal," tambah politisi F-PKS ini.

Sohibul juga mengatakan, kesalahan yang terjadi pada Pileg ini, jangan sampai terjadi pada Pemilu Presiden yang berlangsung sekitar 3 (tiga) bulan lagi. Harus ada perbaikan, dan menjadikan Pemilu ini untuk bahan evaluasi.

"Ini kan kita punya waktu 3 bulan lagi untuk Pemilu Presiden. Kami akan terus mengawasi kinerja penyelenggara Pemilu. Jangan sampai soal DPT dan logistik Pemilu menjadi permasalahan lagi. Tiga bulan ini harus digunakan untuk perbaikan. Kita akan dorong itu," janji Sohibul. (sf)/foto: [iwan armanias/parle/hr](http://iwan.armanias/parle/hr).

DPR Harapkan Pemilu Berlangsung Luber dan Jurdil

Pemilihan Umum Legislatif berlangsung tak kurang dari 1 hari lagi. Ketua DPR RI Marzuki Alie berharap, Pemilu dapat berlangsung sesuai harapan dan terlaksana dengan baik.

“Kita harapkan Pemilu ini berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, serta aman. Kalau itu bisa ditegakkan, pemilu berlangsung secara demokratis dan pemilu yang damai serta sesuai harapan kita. Mudah-mudahan, momentum ini akan membawa Indonesia menjadi jauh lebih baik dibandingkan pasca Pemilu 2009,” ujar Marzuki saat ditemui di Gedung Nusantara II, Senin (7/04).

Ia mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk dapat mempergunakan hak pilihnya. Dengan harapan, kedepannya kondisi Indonesia semakin baik.

“Gunakan hak suara pada 9 April 2014 ini, agar masyarakat ikut menentukan masa depan Indonesia yang diinginkan, tentu melalui partai politik dan calon-calon legislatif yang dipilih melalui proses pemilu ini. Mudah-mudahan Indonesia menjadi lebih baik lagi,” harap Marzuki.

Ia juga berharap kepada seluruh pihak untuk terlibat dalam pesta demokrasi ini. Termasuk aparat keamanan untuk dapat melakukan pengamanan. Hal ini terkait dengan berbagai kekerasan yang terjadi di beberapa



Ketua DPR RI Marzuki Alie.

daerah pra pemilu akhir-akhir ini.

“Kita minta kepada Polri untuk melakukan pengamanan dengan baik, termasuk TNI juga untuk tetap menjaga kedaulatan kita. Sehingga pemilu ini, tidak direcoki oleh ekstrimis, teroris, dan lain sebagainya,” tambah Marzuki.

Politisi Demokrat ini menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab ini kare-

na menginginkan pemilu yang gagal.

“Ini ada usaha-usaha bagi kelompok masyarakat atau oknum dan termasuk pengaruh asing yang menginginkan pemilu ini berjalan dengan tidak sukses. Kita tahu tentu ini di daerah-daerah yang memang masih rentan sekali dengan konflik, Aceh, Papua, dan beberapa daerah perbatasan lainnya,” tutup Marzuki. (sf)/foto:naefurodjie/parle/hr.

Pemilu di Malaysia Sepi, Hanya Soal Teknis

Pemilihan Calon Legislatif diselenggarakan secara serentak di Malaysia, Minggu (6/04) lalu. Namun, sangat disayangkan Pemilu ini minim antusias dari Warga Negara Indonesia di Malaysia.

Dari berbagai pemberitaan di media, dari ratusan ribu Data Pemilih Tetap

(DPT), hanya sedikit WNI yang mengikuti pencoblosan. Bahkan, di salah satu Tempat Pemungutan Suara yang berada di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), dari hampir 72 ribu kertas suara, total pemilih hanya 1075 orang. Tercatat, ada 102 TPS tersebar di beberapa titik di Malaysia.

Menanggapi sepihnya pelaksanaan Pemilu di Malaysia, Ketua DPR RI Marzuki Alie menilai ini masalah teknis. Pasalnya, untuk mencoblos dibutuhkan waktu yang tidak sebentar, sehingga cukup mengganggu rutinitas WNI.

“Minimnya partisipasi Pemilu di



Ketua DPR Marzuki Alie saat diwawancara wartawan.

Malaysia, itu hanya masalah teknis. Banyak juga yang tidak terdaftar. Mereka tidak mungkin berlama-lama hanya untuk memberikan hak suara. Jadi, pusat-pusat pendaftaran itu harus diperbanyak, jadi mereka tidak memerlukan waktu lama, apalagi sampai meninggalkan pekerjaan,” kata Marzuki, di Gedung Nusantara II, Senin (7/04).

Politisi Demokrat ini menilai, kurang-

nya antusias WNI mengikuti Pemilu karena waktu untuk menunggu giliran pencoblosan terlalu lama. Apalagi yang bekerja, menurutnya tidak mungkin WNI meninggalkan pekerjaannya.

“Mereka terlalu lama meninggalkan pekerjaan, itulah yang mengakibatkan mereka akhirnya pulang. Akibatnya partisipasi pemilih menjadi rendah,” ujar Marzuki. (sf)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Komisi VIII Dorong Peran Bimas Islam Untuk Bimbing Para “Ustad”

Anggota Komisi VIII DPR RI, Asep Maoshul Affandy mendorong Kementerian Agama untuk melakukan bimbingan kepada masyarakat, tidak terkecuali kepada pemuka agama seperti ustad dan da’i. Hal tersebut dikatakan Asep kepada Parle, Selasa (8/4).

Apa yang diungkapkan Asep itu terkait adanya beberapa kasus dugaan penyelewengan ajaran agama yang dilakukan oleh salah seorang ustad belakangan ini dan menjadi pembicaraan publik.

“Sebenarnya definisi ustad itu kan guru, walaupun memang identik dengan agama. Namun terkadang pemberian gelar ustad itu bukan berasal dari masyarakat yang menganggap guru, melainkan dari kelompoknya bahkan dari dirinya yang meminta dipanggil seperti itu. Padahal ia tergolong yang awam. Akibatnya pemahaman terhadap agamanya sangat sempit, sehingga terjadi penyelewengan terhadap ayat Al Quran, padahal



Anggota Komisi VIII DPR, Asep Maoshul Affandy.

tidak ada ajaran Islam yang merugikan manusia,” papar Asep.

Disinilah tugas Kementerian agama untuk melakukan bimbingan, rehabilitasi dan pengawasan terhadap semua masyarakat tidak terkecuali ustad

atau ulama. Berat memang, tapi hal tersebut merupakan tantangan untuk penegakan akidah.

“Kementerian Agama khususnya Bimas Islam, harus jeli terhadap perbuatan-perbuatan penyelewengan agama yang ada di masyarakat. Bahkan hal tersebut bisa digolongkan ke dalam penipuan. Nah jika sudah penipuan, maka hal itu sudah masuk ke dalam ranah hukum,” ungkapnya.

Khusus untuk masyarakat yang menjadi korban penipuan oknum “ustad”, karena sudah masuk ranah hukum, maka ia menyarankan untuk penyelesaiannya juga harus mengikuti proses hukum yang berlaku di Indonesia.

“Namun untuk pencegahan agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi, Komisi VIII mendorong keras Bimas Islam Kementerian Agama untuk terus melakukan pembinaan,” tegasnya. (Ayu) foto: andri/parle/hr.

Penanganan TKI Masih Seperti Pemadam Kebakaran

Menyusul kasus Satinah, tenaga kerja Indonesia (TKI) yang sempat diancam hukuman pancung di Arab Saudi, pemerintah dinilai selama ini masih bersifat sporadis menangani kasus TKI. Artinya, ketika ada TKI yang terancam hukuman, pemerintah baru bergerak. Pemerintah masih seperti pemadam kebakaran.

“Seperti yang sudah-sudah, saya melihat penanganan pemerintah terhadap kasus-kasus buruh *migrant* bak pemadam kebakaran. Kalau ada kasus, baru panik. Dan itu dilakukan menjelang *date line*. Lobi-lobi tingkat tinggi pun tampaknya baru dilakukan bila ada dorongan dari pihak ketiga seperti LSM dan DPR.” Demikian penegasan Anggota



Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati.

Komisi IX DPR RI Okky Asokawati (F-PPP), Selasa (8/4).

Tidak hanya Satinah yang terancam hukum mati, masih banyak TKI lainnya yang juga terancam hidupnya di Arab Saudi. Namun, selama ini belum terlihat upaya pemerintah dalam memberi bantuan dan perlindungan hukum jauh-

jauh hari. “Nanti menjelang date line baru terseok-seok dan terburu-buru seperti pemadam kebakaran,” nilai Okky.

Ditanya soal pemberlakuan kembali moratorium pengiriman TKI ke luar negeri terutama ke negara-negara yang banyak masalah dengan TKI, Okky menjelaskan, walau moratorium diberlakukan tetap saja selalu ada pengiriman TKI ilegal. Masalah TKI tidak bisa diselesaikan dengan memberlakukan moratorium. Masalah hakikinya ada di dalam negeri sendiri. Untuk itu, mekanisme rekrutmen TKI mesti diperketat.

“Temuan saya beberapa waktu lalu, tes-tes bagi calon TKI tidak dilakukan dengan baik, seperti adanya tes kesehatan dan psikologi. Kalau pun ada, tes tersebut biasanya dilakukan sekadarnya. Padahal, profil kepribadian amat penting untuk melihat calon TKI tersebut memiliki ketangguhan atau tidak ketika harus bekerja di bawah tekanan dan jauh dari Tanah Air,” ungkap Okky.

Profil hasil tes calon TKI itu biasanya direkayasa lagi oleh agen penyalur TKI agar bisa diterima di negara tujuan. Contoh konkretnya, kata Okky, adalah Wilfrida, TKI di Malaysia yang identitasnya dipalsukan. Dari sini jelas, masalah ada di dalam negeri dan lemahnya pengawasan dari pemerintah. Di tengah lemahnya pengawasan, para calo pun leluasa mengeksploitasi para calon TKI. (mh)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Pelaksanaan Pemilu Harus Paralel Dengan Peningkatan Kesra

Wakil Ketua DPR Sohibul Iman berharap, pemilu legislatif yang digelar Rabu (9/4) akan menghasilkan kepemimpinan yang baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Pemilu yang dilaksanakan lima tahun sekali ini harus paralel dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perbincangan dengan TV Parlemen pada acara Semangat Pagi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4), Pimpinan DPR dari Fraksi PKS ini mengatakan, masyarakat akan merasakan putus asa kalau setiap lima tahun pelaksanaan pemilu, tidak berkaitan (nyambung) dengan kesejahteraan.

“Saya berani bersaksi bahwa setiap pemilu perubahan itu ada. Bahwa perubahan itu belum ideal seperti yang kita inginkan, kami juga tahu. Supaya semakin cepat dan ideal, maka pilihlah wakil-wakil yang semakin baik, sebab dengan memilih lebih selektif maka perubahan ke arah yang lebih baik

akan lebih cepat terjadi,” ungkapnya.

Di bagian lain, Pimpinan DPR Koordinator Ekonomi dan Keuangan ini mengharapkan adanya edukasi politik kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih kritis dan memiliki instrumen untuk mengevaluasi wakil-wakilnya. Dengan demikian, ke depan tidak akan muncul wakil yang asal-asalan karena rakyat makin kritis.

Dia memberi contoh, mengetes kepada masyarakat di Dapil Jabar 11 meliputi Tasikmalaya dan Garut ternyata tidak ada satupun yang mengenal nama wakil-wakilnya yang duduk di DPR. Dari Dapil Jabar 11 ada wakil 10 orang di DPR, namun tidak dikenal oleh warganya bahkan tidak ada yang tahu. “Bagaimana mau mengevaluasi, sementara nama-nama wakilnya saja tidak tahu. Jumlahnya tidak tahu, namanya juga tidak tahu,” kata Sohibul.

Kemudian dia memberi saran, pada pemilu 2014 ini nanti nama wakil-



Wakil Ketua DPR Sohibul Iman.

wakilnya diminta dipajang disamping pesawat TV. Kalau mendengar dan menyaksikan berita menyangkut 10 wakilnya, ternyata berbuat penyelewengan, kasih warna merah, kalau mau memperjuangkan kepentingan

masyarakat, kasih warna biru. “Nanti rakyat memiliki rapor sendiri terhadap wakilnya, sehingga pada pemilu berikutnya sudah tidak susah lagi menjatuhkan pilihannya,” ujarnya.

Dia melakukan itu dalam rangka memberi pemahaman baru kepada masyarakat bahwa evaluasi itu adalah mutlak. Seorang pemimpin harus dievaluasi sehingga akan tertolong untuk tidak melakukan perbuatan yang tercela.

Komisi III Tolak Usulan Kenaikan Gaji Hakim Agung



Anggota Komisi III DPR Fahri Hamzah.

Anggota Komisi III DPR RI Fahri Hamzah menolak usulan Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki tentang kenaikan gaji hakim agung menjadi sebesar 500 juta. Menurutnya hal itu adalah langkah yang tidak tepat. Hal tersebut diungkapkan Politisi dari Fraksi PKS kepada Parlemen, Selasa (8/4).

“Sampai saat ini usulan tersebut belum dibicarakan kepada DPR, namun jika memang ada usulan tersebut menurut saya adalah langkah atau cara yang tidak tepat. Mengingat selama ini gaji hakim agung sudah sangat tinggi, terlebih

Sohibul menyatakan yakin, kalau anggota DPR 20% saja yang sangat bagus dan baik, maka DPR baik. Karena dalam konteks bernegara, yang bekerja serius 20% maka kemakmuran negara akan tercipta, selebihnya turut menikmati. “Itu yang digunakannya dalam organisasi. Kalau wakil rakyat 20% luar biasa, saya yakin DPR akan baik,” tegas Sohibul menambahkan. (mp,as)/foto:iwan armanias/parle/hr.

lagi adanya tunjangan-tunjangan di dalamnya,” jelas Fahri.

Dilanjutkannya, hal tersebut menjadi sebuah cermin jika strategi pemberantasan korupsi selama ini tidak terintegrasi. Sehingga masing-masing pihak merasa gaji atau penghasilannya kurang dan perlu dinaikkan. Padahal ide kenaikan gaji itu, tidak hanya terkait dengan hakim itu sendiri, melainkan juga menyangkut keseluruhan sistem yang ada, mulai dari hukum pidana sampai kepada ide pemberantasan korupsi itu sendiri.

“Kalau gaji hakim selangit, sementara gaji polisi rendah, bukan tidak mungkin akan timbul dendam atau perasaan cemburu dalam diri polisi. Pada akhirnya jika ada sebuah kasus polisi akan mem”proses”nya sendiri, karena toh dianggapnya gaji hakim sudah sangat tinggi. Jika sudah demikian hukum pasti tidak akan bisa ditegakkan. Oleh karena itu, usulan kenaikan gaji hakim yang sedemikian tinggi itu pasti akan berpengaruh kepada hal lainnya dalam sebuah sistem,” papar Fahri.

Jika usulan tersebut disampaikan kepada DPR kelak usai masa reses, ditambahkan Fahri, ia berkeyakinan Komisi III DPR RI akan menolaknya.

Sebagaimana diketahui beberapa waktu lalu Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki mengusulkan kenaikan gaji hakim agung menjadi sebesar 500 juta rupiah. Suparman mencontoh Singapura yang menggaji hakim agungnya 450 juta rupiah per bulan. (Ayu)/foto:naefurodjie/parle/hr.

Keamanan Pemilu, Komisi III Minta Polri Beri yang Terbaik

Anggota Komisi III DPR RI Nudirman Munir meminta segenap jajaran Polri memberikan yang terbaik dalam menjaga keamanan dan ketertiban hajatan besar rakyat Indonesia, Pemilu 2014. Ia mengakui anggaran untuk keamanan pada pemilu kali ini tidak optimal di-

berikan tetapi ia berharap Polri dapat memahami ditengah kondisi bangsa saat ini.

“Kita mengucapkan selamat bertugas kepada aparat Polri dimanapun berada, berikan yang terbaik kepada

negara. Sebenarnya kita juga prihatin karena anggaran yang telah disetujui Komisi III ternyata tidak dapat direalisasikan tetapi mudah-mudahan semua berjalan lancar,” paparnya saat dihubungi di Jakarta, Senin (7/4/14).



Anggota Komisi III DPR Nudirman Munir.

Dalam pemantauannya di daerah pemilihannya Sumbar II jumlah Posko Pemilu kepolisian jauh berkurang, tidak

seperti pemilu sebelumnya hampir disetiap pelosok dengan mudah ditemukan. “Sebenarnya ini riskan juga, apalagi ada sejumlah kasus keamanan di Aceh dan Papua,” lanjutnya.

Pada bagian lain ia berharap petugas kepolisian dapat memberikan perhatian menyikapi perkembangan kasus *money politic* yang menurutnya cukup mengkhawatirkan. Baginya membiarkan berlangsungnya pemilu dengan iming-iming uang lebih berbahaya dari pada pencuri di pasar.

“Seharusnya kepolisian bisa proaktif, pasang intelijen jangan menunggu laporan. *Money politic* ini berbahaya karena dilakukan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, maling di pasar hanya mencuri untuk dirinya,” demikian Nudirman.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Pol. Sutarmanto menjelaskan anggaran pengamanan Pemilu 2014 yang disetujui adalah Rp.1,6 triliun dari yang diajukan sebesar Rp.3,5 triliun. Dana tersebut berarti sama dengan Pemilu 2009 lalu. Ia menyebut telah melakukan penghematan, misalnya jika 100 personel yang harus diturunkan namun anggaran hanya cukup untuk 60 personel, maka tetap 100 personel yang ditugaskan dengan anggaran yang diperkecil.

“Kepolisian nggak mau ambil resiko, jadinya harus tetap mengerahkan 100 orang. Jadi, anggaran untuk 60 petugas tadi, misalnya dapat Rp 1,5 juta per orang, jadi cuma hanya Rp 900 ribu per orang. Ya itu karena dibagi orang yang lebih banyak. Jadi, ya harus mengirit,” ujar dia. (iky)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Tidak Bijak Hapus Pajak Impor Kakao

Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana menghapus pajak bea masuk impor kakao, karena pasokan di dalam negeri dinilai tidak mencukupi untuk kebutuhan industri. Kebijakan ini dinilai sangat tidak bijak, karena tidak sesuai dengan realitas yang ada.

Demikian penegasan Anggota Komisi VI DPR RI Atte Sugandi (F-PD) saat dihubungi, Senin (7/4). “Kebijakan impor itu sangat tidak bijak, karena pasti merusak harga di tingkat petani. Indonesia kan produsen kakao terbesar nomor dua di dunia setelah Pantai Gading,” tegas Atte. Sangat ironis sebagai produsen kakao nomor dua, Indonesia harus mengimpor.

Alasan kebijakan impor kakao untuk memenuhi kebutuhan industri, menurut Atte juga sangat tidak bisa diterima. Realitasnya, petani kakao kita masih mampu memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Sebaliknya, Indonesia justru mengekspor kakao ke luar negeri, terutama pasar Eropa.

Atte menjelaskan, dalam setiap kebijakan impor produk pertanian, masyarakat petani mesti diajak bicara. UU Pertanian sudah memberi perlindungan untuk itu. Bahkan, bila petani gagal panen, ada perlindungan asuransi bagi para petani. Dalam Pasal 3 huruf D, UU No.19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, jelas para petani kita dilindungi dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen. UU sudah jelas mengaturnya, tapi tetap saja petani selalu ditinggal.

Ironisnya lagi produk olahan kakao berupa coklat justru yang terkenal dari Eropa, seperti Swiss dan Belanda. Padahal, kakaonya dari Indonesia. Ini memilukan ditambah bila



Anggota Komisi VI DPR Atte Sugandi.

memang benar pemerintah berencana mengimpor kakao. Petani terus dibuat menderita tak berdaya. “Kalau memang kekurangan bolehlah impor. Tapi kalau masih cukup pasokan di dalam negeri, kenapa harus impor,” keluh Atte.

Seperti diketahui, saat ini harga kakao di tingkat petani Rp30 ribu/kg. Pada 2013, produk kakao Indonesia sempat mencapai 740.513 ton. Itu prestasi produksi yang bagus. Pada bagian lain Atte juga menghimbau agar sistem distribusi produk pertanian dibenahi kembali. Jangan sampai membebani para petani dari biaya tinggi. (mh), foto : iwan armanias/parle/hr.

Komisi X DPR Pantau UN di Jateng, Sulsel dan Kepri



Tim Komisi X DPR tinjau pelaksanaan UN.

Komisi X DPR yang membidangi Pendidikan menurunkan tiga tim ke daerah-daerah untuk memantau Ujian Nasional (UN). Ketiga daerah tersebut yaitu, Propinsi Jawa Tengah, Sulsel dan Kepulauan Riau (Kepri).

Untuk Propinsi Jawa Tengah dipimpin langsung oleh Ketua KOMisi X DPR Agus Hermanto selaku ketua tim rombongan didampingi oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto dan 11 ang-

gota lainnya.

Pada kunjungan ke Jawa Tengah, tim direncanakan tiba pada hari Senin, 14 April. Pada pukul 7.15-10 pagi hari tim akan meninjau SMU, SMK dan MK melihat pelaksanaan UAN di wilayah Jateng.

Kemudian dilanjutkan pertemuan dengan Kepala dinas Pendidikan Provinsi Jateng, Rektor Universitas

Negeri Semarang (Unes) dan Dewan Pendidikan, Kepala Sekolah, dan Guru Provinsi Jateng.

Tinjau Sulsel

Sementara pada kunjungan kerja Ke Sulsel dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Syamsul Bachri didampingi oleh 12 orang anggota dari berbagai Fraksi di DPR.

Tim berangkat hari Minggu, 13 April pukul 13.30 WIB, kemudian keesokan harinya, Senin, 14 April, pukul 8 pagi harinya, tim meninjau langsung pelaksanaan Ujian Nasional SMA, SMK, dan MA. Kemudian kembali Jakarta pada pukul 12 siang se usai kunjungan ke berbagai sekolah.

Tim lainnya yang ke Provinsi Kepri dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR Asman Abnur, tiba pada hari Minggu 13 April di Kepri. Selanjutnya dilanjutkan pertemuan pada malam harinya dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Kepala Sekolah dan Dewan Guru Provinsi Kepri. Keesokan harinya Senin 14 April, dilanjutkan dengan peninjauan lapangan langsung pelaksanaan Ujian Nasional SMKN, SMAN dan MA. Setelah itu tim kembali menuju Jakarta. *(sugeng/suci) foto supriyanto/parle/hr.*

Kehadiran Anggota DPR Rendah Karena Aturannya Terlalu Longgar



Ketua DPR RI Marzuki Alie.

Soal kehadiran anggota DPR dalam rapat-rapat baik rapat-rapat Komisi maupun rapat paripurna, tidak hanya masyarakat yang kecewa, Ketua DPR Marzuki Alie juga merasa kecewa. " Saya sendiri kecewa, sebab aturan yang dibuat DPR periode sebelum ini terlalu longgar. Aturan itu akan diubah melalui revisi UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) sehingga bisa lebih ketat. Mudah-mudahan anggota DPR mendatang lebih baik," katanya dalam Dialog Semangat Pagi dengan TV Parlemen, Senin (7/4) di loby Nusantara II Gedung DPR Senayan, Jakarta.

Menurut Marzuki, aturan selama ini anggota Dewan yang tidak hadir dalam rapat paripurna 6 kali berturut-turut, bisa dikenai sanksi. Ternyata aturan ini disiasati dengan 5 kali

berturut-turut tidak hadir, lalu sekali hadir, akhirnya terbebas dari sanksi. “Nantinya harus dibuat aturan, jangan 6 kali berturut-turut, tetapi misalnya tidak hadir 6 kali dalam rapat paripurna akan kena sanksi,” tegasnya.

Termasuk kunjungan keluar negeri, menurut Marzuki, aturannya dibuat terlalu longgar misalnya untuk tugas diluar legislasi bisa dilakukan. “Kami terapkan studi banding atau kunjungan ke luar negeri hanya untuk tugas yang berkaitan dengan bidang legislasi sebab ini sangat penting terkait dengan kebijakan publik,” ia menambahkan.

Dikatakan lebih lanjut bahwa masa tugas DPR yang tinggal 6 bulan ini akan diprioritaskan untuk menyelesaikan paling tidak dua RUU yakni RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan RUU tentang Kelautan. Dengan RUU

Tapera diharapkan semua rakyat Indonesia memiliki rumah dan terkait RUU Kelautan dengan sumber daya alam yang luar biasa bisa dinikmati bangsa sendiri, bukan oleh bangsa lain.

Ia tidak mengelak kinerja DPR sekarang ini menjadi sorotan masyarakat. Namun kinerja Dewan sekarang ini tidak bisa dilepaskan dari DPR sebelumnya, karena aturan kerja DPR sekarang dibuat oleh DPR periode sebelumnya. “Kami ingin DPR berikutnya akan lebih baik, maka akan kami buat aturan yang lebih menggigit sehingga DPR lebih disiplin dan pada akhirnya rakyat akan merasakan betul-betul DPR sebagai representasi dari rakyat. Dengan demikian apapun yang dikerjakan oleh DPR akan dipercaya masyarakat,” kata Marzuki menambahkan. (mp), foto : eka hindra/parle/hr.

Perlunya Peringatan Dini Daerah Rawan Bencana oleh BNPB

Anggota Komisi VIII DPR RI, Amran mengingatkan agar BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yang notabene menjadi mitra kerjanya untuk memberikan peringatan dini daerah-daerah rawan bencana, termasuk jalur-jalur yang dilalui Kereta Api atau angkutan publik lainnya.

Hal tersebut diungkapkan Amran saat dihubungi Parlemen Senin (7/4) terkait adanya kecelakaan anjloknya Kereta Api (KA) Malabar di Tasikmalaya, Jawa Barat pada Jumat pekan lalu.

“Bencana alam memang tidak bisa diprediksi kedatangannya, namun pasti BNPB memiliki data-data mengenai daerah rawan bencana, seperti rawan longsor dan rawan gempa, termasuk daerah yang dilalui jalur kereta api atau angkutan publik lainnya. Data-data ini seyogyanya disampaikan kepada instansi terkait, baik itu Pemda setempat maupun Pihak Perhubungan atau PT KAI. Dengan adanya peringatan dini tentu dapat mengantisipasi terjadinya korban,” ungkap Amran.

Oleh karena itu dilanjutkan Amran, selain perlu perlunya koordinasi dan kerjasama semua pihak, baik itu BNPB, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), dan Pemda setempat serta Kemenhub. Juga diperlukan penyisiran ulang daerah-daerah yang dalam data BNPB termasuk rawan bencana. Seperti jalur pegunungan, tebing maupun sisi sungai yang biasa dilalui jalur Kereta api, termasuk pemeriksaan kembali bantalan-bantalan rel kereta api.

“Tanpa mengurangi rasa duka cita dan empati saya kepada keluarga para korban kecelakaan, tentu di balik peristiwa ada hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik oleh semua pihak, agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Seperti penyisiran ulang daerah rawan bencana longsor,” ujarnya.



Anggota Komisi VIII DPR Amran.

Berdasarkan laporan awal dari BPBD Kabupaten Tasikmalaya, Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan ada lima korban meninggal dunia akibat anjloknya Kereta Api Malabar Jurusan Bandung-Malang. Anjloknya Kereta tersebut ke dalam jurang akibat tanah longsor setelah diguyur hujan terus menerus.

Selain BPBD, upaya evakuasi juga dilakukan oleh Tim Gabungan TNI, Polri, PT KAI, Basarnas, PMI, Tagana dan masyarakat. Saat ini seluruh penumpang telah di evakuasi, dan PT KAI dibantu oleh TNI AD masih melakukan perbaikan jalur kereta api dengan pengerjaan rel baru untuk memulihkan jalur selatan Jawa Barat. Akibat peristiwa ini sejak dua hari lalu perjalanan kereta api dari Bandung menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur dialihkan melalui jalur utara Cirebon. (Ayu), foto : naefurodjie/parle/hr.

Disambut Positif Penggunaan Barcode oleh PPLN

Anggota Komisi II DPR RI Azhar Romli menyambut positif penggunaan *Barcode* yang diterapkan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Singapura. Hal tersebut diungkapkan politisi dari Fraksi Golongan Karya Kepada Parle, Senin (7/4).

“Penggunaan *Barcode* yang merupakan produk alat canggih akan sangat baik untuk meminimalisir atau menghilangkan kecurangan dalam pemilu. Dengan sistem ini keamanan data dapat terjamin, karena surat suara yang diberikan kepada calon pemilih diterima oleh mereka yang berhak,” jelas Azhar.

Hal ini berbanding terbalik dengan yang ia temukan di masyarakat terutama di daerah pemilihannya (Dapil Bangka Belitung), dimana sampai H-2 kartu suara belum sampai kepada masyarakat. Bahkan ia mendapat informasi jika hal itu merupakan permainan dari aparat setempat untuk menekan masyarakat memilih sesuai partai yang diusungnya.

Jika kelak penggunaan *Barcode* pada pemilu di KBRI



Anggota Komisi II DPR Azhar Romli.

Singapura ini memang bisa menghilangkan kecurangan, dikatakan Azhar pihaknya tidak segan-segan untuk memberi masukan kepada KPU untuk ke depannya atau mungkin dalam Pemilihan Presiden kelak untuk menggunakan *Barcode* ke seluruh pemilih di Indonesia.

“Jika memang penggunaan *Barcode* bisa menghilangkan kecurangan, ke depan tidak ada salahnya untuk mengadopsi sistem tersebut ke seluruh Indonesia, demi menghasilkan Pemilu yang berkualitas, jujur, adil dan aman. Namun tentu hal itu harus dikaji dan dipelajari terlebih dahulu dan out putnya bagaimana. Kita lihat saja nanti,” akunya.

Penggunaan *barcode* konon juga dapat mempercepat proses registrasi sehingga para pemilih dapat langsung diarahkan ke TPS yang kosong. (Ayu), foto : riska/parle/hr.

Petugas TPS Diingatkan Jangan Bermain dengan Kejahatan Pemilu

Pemungutan suara Pemilihan Umum legislatif (Pileg) yang digelar Rabu (9/4) diharapkan akan berlangsung demokratis dan damai. Bagi penyelenggara terutama KPU hingga TPS dan Bawaslu, jangan sampai petugas bermain dengan kejahatan pemilu. “Jangan sampai petugas TPS bermain, diharapkan menjalankan tanggungjawabnya dengan amanah dan baik, sehingga pemilu berjalan dengan jujur dan adil,” demikian pesan Ketua DPR Marzuki Alie, Senin (7/4) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen.

Kepada para elit parpol, diminta ikut bersama-sama menegakkan aturan yang telah disepakati bersama. Jangan sampai parpol malah mencari celah untuk berbuat curang dan jangan menimbulkan ketidakpercayaan. Jangan melontarkan kekhawatiran, jangan nanti curang. “Pikirannya hanya curang, curang dan curang saja. Semuanya harus berpikir positif, berkontribusi



Ketua DPR RI Marzuki Alie.

supaya pemilu bisa berlangsung dengan jujur dan adil,” tegasnya.

Kepada segenap masyarakat, Marzuki Alie mengharapkan agar bisa menjaga agar pemilu ini berjalan se-

cara demokratis. Kalau ini bisa dijaga, Ketua DPR optimis pesta demokrasi lima tahunan ini akan berjalan langsung, umum bebas dan rahasia serta jujur, adil, damai dan aman. “Ini saya harapkan berlangsung baik, kalau ini bisa dicapai, maka momentum kebangkitan ekonomi akan terwujud,” ujarnya.

Menurut Pimpinan Dewan ini, posisi Indonesia di kawasan Asean saat ini luar biasa bagus. Philipina ada masalah, Thailand juga bermasalah, Malaysia dengan kasus MH 370 juga bermasalah. Makanya dunia internasional menaruh perhatian kepada Indonesia, artinya momentum ini sangat baik bagi Indonesia, maka kalau bisa dimanfaatkan dengan baik maka ekonomi kita akan meningkat dan pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (mp,as), foto : eka hindra/parle/hr.



Pemerintah Patut Bantu Napi Ikuti Program BPJS

Anggota Komisi III DPR RI Harry Witjaksono mengaku menerima masukan tentang belum terdatanya sejumlah narapidana di beberapa Lembaga Pemasyarakatan sebagai anggota BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Ia berpandangan sudah sepatutnya pemerintah memfasilitasi para napi yang statusnya sedang menjadi warga binaan.

“Sudah sepatutnya para narapidana yang berada di Lapas di seluruh Indonesia mengikuti program jaminan kesehatan yang dikelola BPJS. Seharusnya dananya sudah dianggarkan dalam APBN 2014,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Kamis (3/4).

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jabar VI (Kota Bekasi dan Depok) ini menyebut sesuai konstitusi memperoleh pelayanan kesehatan adalah hak dasar warga negara. Ia berharap bekerja sama dengan BPJS, layanan kesehatan untuk para napi dapat lebih ditingkatkan.

“Saya sering berkunjung ke Lapas, melihat fasilitas kesehatan untuk warga binaan yang memang sangat minim. Ini harus diperbaiki karena mereka juga warga negara juga kan,” tambahnya.

Pada sisi lain, ia meminta segenap pihak dapat memaklumi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS



Anggota Komisi III DPR Harry Witjaksono.

adalah program yang baru dijalankan pada awal tahun 2014. Sehingga proses pendataan layanan untuk seluruh rakyat Indonesia ini perlu waktu sampai tuntas menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Yang pasti masukan ini kita akan sampaikan kepada Menkumham cq Dirjen Lembaga Pemasyarakatan agar menjadi perhatian. Kalau ada kendala segera kita carikan solusinya,” demikian Harry. (iky), foto : andri/parle/hr.

KY Diminta Lebih Profesional

Ketua Komisi III DPR RI Pieter C. Zulkifli menilai Komisi Yudisial (KY) perlu lebih jeli dalam memahami sejumlah persoalan dalam mendorong perbaikan kinerja para hakim termasuk Hakim Agung. Usulan kenaikan gaji Hakim Agung sampai Rp.500 juta menurutnya bukan solusi, apalagi kalau memperhatikan kondisi masyarakat saat ini.

“Saya pikir usulan itu sangat berlebihan. Apakah dengan gaji hakim tinggi kemudian segala persoalan keadilan bisa berubah. KY harus lebih profesional dalam memahami akar persoalan yang ada saat ini,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Senin (7/4).

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur V (Kab. Malang, Kota Batu dan Kota Malang) ini menambahkan ada masalah mendasar yang perlu menjadi perhatian KY, yaitu persoalan



Ketua Komisi III DPR Pieter C. Zulkifli.

keadilan yang saat ini menjadi barang langka terutama bagi masyarakat miskin. Disisi lain orang kaya mampu merubah otoritas hakim sehingga memihak kepentingan mereka.

Bicara pada kesempatan berbeda anggota Komisi III dari FPG Nudirman Munir menilai usulan ini mengesankan

KY sudah kehabisan bahan untuk memperbaiki kinerja Hakim Agung. Baginya sejumlah kasus korupsi yang terjadi sudah dapat menunjukkan bahwa uang tidak dapat memuaskan siapapun.

“Kita perlu membangun sistem, itu yang penting. Kalau hakim koruptor tetap saja korupsi. Contoh kasus saudara Akil Mochtar yang menerima suap Rp.1 miliar tetap saja merasa belum cukup. Jadi ini masalah mental,” tekannya.

Ia menambahkan di negara seperti Singapura, gaji Hakim Agung diberikan sangat tinggi, tetapi kemampuan ekonominya memang termasuk terbesar di dunia. Kalau hal ini diberikan kepada hakim di Indonesia, Wakil Rakyat dari Dapil Sumbar II ini meyakini akan ditolak masyarakat. (iky)/foto:naefurodjie/parle/hr.

Mantan Sekjen DPR Afif Ma'roef Tutup Usia

Mantan Sekretaris Jenderal DPR-RI periode 1994-1999 Letnan Jenderal (Purn.) Afif Ma'roef meninggal dunia di Rumah Sakit Gatot Subroto Jakarta, Selasa 8 April 2014 pukul 22.55 WIB dalam usia 73 tahun. Jenazah Almarhum sempat disemayamkan di Rumah Duka Jl. Pecandran III Komplek Widya Candra Jakarta Pusat, sebelum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata.

Sebelumnya diadakan upacara penyerahan jenazah dari pihak keluarga almarhum kepada Mabes TNI yang diwakili Inspektur upacara Mayjen TNI Unggul K Yudoyono.

Dalam sambutannya ia mengatakan, dengan kepergian almarhum kita telah kehilangan putera bangsa yang baik, yang selalu memegang teguh prinsip-prinsip perjuangan, setia kepada negara, dan telah bekerja keras dalam mengemban setiap tugas negara yang menjadi tanggungjawabnya.

Semasa hidupnya almarhum selalu mengemban tugas dengan penuh semangat dan keikhlasan. Sikap tersebut menurutnya sangat bermanfaat untuk



Upacara pemakaman Mantan Sekjen DPR RI periode 1994-1999 Letjen.(Purn.) Afif Ma'roef di TMP Kalibata.

disurituladani kita semua yang masih hidup dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara.

Disisi lain kata Unggul, almarhum sebagai manusia biasa semasa hidupnya juga tidak luput dari segala kehilapan dan kealpaan. Untuk itu ia mengajak para hadirin untuk sudi melampungkan dada dan memaafkan segala kesalahan almarhum semasa hidupnya.

Wakil Keluarga almarhum Achmad Sani Al Husain mengharapkan para hadirin untuk memaafkan atas per-

buatan dan kesalahan almarhum baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Kepada sahabat-sahabat seangkatan almarhum, rekan-rekan almarhum di Sekretariat Jenderal DPR dan MPR serta tidak lupa kepada Tentara Nasional Indonesia Achmad Sani menyampaikan terima kasihnya karena telah memberikan perhatian yang luar biasa sehingga acara penghormatan dan pemakaman almarhum dapat berjalan dengan lancar serta hikmat. (Spy), foto : supriyanto, naefurodji/parle/hr.

Wakil Ketua BKSAP : Pemilu Kali ini Lebih Berkualitas

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Andi Anzhar Cakra Wijaya menilai pemilu kali ini lebih berkualitas. Hal tersebut terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam menyalurkan suaranya.

“Masyarakat sekarang lebih berkualitas. Mereka sudah mempunyai pola pikir bahwa caleg yang tidak pernah turun, berhubungan dengan konstituennya mereka tidak bakal dipilih. Caleg yang cuma memberi bantuan amplop tidak akan mereka pilih. Mereka lebih ingin berinteraksi dengan calon wakil mereka,” jelas Andi usai menggunakan hak pilihnya bersama sang istri Rini Susilowati dan putra sulungnya Andi M Alif Anzharputra, Rabu (9/4).

Dilanjutkannya, jika kualitas pemilu baik, partisipasi masyarakat juga lebih bagus, maka yang akan muncul kelak adalah pemimpin dan wakil rakyat yang baik dan berkualitas juga. Namun sebaliknya, jika pemilunya tidak jurdil alias banyak kecurangan dan *Money Politic*, dan tingkat partisipasi masyarakat rendah, maka itu pertanda ada yang kurang baik, dan sulit menghasilkan pemimpin atau wakil rakyat yang baik. (Ray) foto: ray/parle/hr.



Wakil Ketua BKSAP DPR, Andi Anzhar Cakra Wijaya dan keluarga usai pencoblosan.

Pengajian Akbar di Masjid Baiturrahman DPR Hadirkan Tiga Capres

Pengajian Akbar yang diselenggarakan Korpri Setjen DPR bekerja sama dengan Tv One menghadirkan tujuh Pimpinan Parpol di Masjid Baiturrahman Komplek DPR/MPR, Senayan, Jakarta Selasa (8/4) siang. Pengajian mingguan setiap Selasa kali ini diisi ceramah yang disampaikan Ustadz H. Arifin Ilham.

Ketujuh Pimpinan Parpol tersebut tiga diantaranya adalah Calon Presiden yaitu Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri, H. Roma Irama dari PKB dan KH Hidayat Nur Wahid dari PKS. Empat tokoh lainnya adalah Lukman Hakim Saefuddin dari PPP, Dradjat Wibowo dari PAN, Saan Mustopa dari Partai Demokrat dan Perkasa Alam dari Gerindra.

Dalam ceramahnya Arifin Ilham antara lain mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 9 April, jangan sampai golput. Justru kerusakan suatu bangsa bisa terjadi karena adanya orang-orang yang tidak peduli atau bersikap golput. Dia juga berpesan, dalam pemilu kali ini jangan sampai terjadi politik uang atau suap menyuap.

“Yang nyogok, yang disogok dan perantaranya akan dimasukkan neraka Jahannam,” ujarnya berkali-kali dan diitirukan seluruh hadirin.

H.Rhoma Irama dalam pesannya kepada segenap masyarakat untuk memilih pemimpin harus memenuhi empat kriteria yaitu sidiq artinya benar tidak punya cacat moral, politik dan cacat integritas. Kedua yaitu tabligh-religius artinya agamis, bertaqwa kepada Tuhan Allah SWT dan ketiga amanah, artinya bisa dipercaya tidak khianat kepada bangsa dan negara. Sedangkan keempat adalah fatanah, artinya cerdas secara intelektual, emosional dan spiritual.

“Kalau pemimpin yang dipilih memenuhi kriteria seperti itu, Allah akan memakmurkan dan mengamankan Indonesia,” ucapnya.



Suasana Pengajian Akbar di Masjid Baiturrahman menghadirkan Ustadz H. Arifin Ilham.

KH Hidayat Nurwahid mengharapkan kesempatan pemilu kali ini jangan sampai dimubadzirkan. Ia mengakui dalam perjalanan bangsa hingga saat ini masih ada yang membuat kecewa atau tidak puas, namun yang baikpun masih sangat banyak. Karena itu, kita jangan sampai berputus asa, dan mengajak masyarakat untuk bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilu kali ini.

Sementara itu Perkasa Alam dari Gerindra mengemukakan, tanggal 9 April adalah pemilu kita semua, karenanya kita semua diharapkan bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Jangan sampai Golput, sebab kalau itu yang dilakukan berarti tidak ikut mensukseskan pesta besar bangsa Indonesia lima tahunan ini.

Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, kondisi Indonesia yang sekarang ini patut disyukuri. Caranya, bagaimana kita bisa tetap menjaga dan memelihara kehidupan ini dengan senantiasa berkreasi, berinovasi dan menciptakan hal-hal yang lebih baik lagi. Pemilu, kata Lukman Hakim, adalah upaya kita bagaimana syukur dan sabar itu senantiasa meliputi ketika menggunakan kedaulatan dan memberikan amanah pada calon pemimpin kita.

Wasekjen Partai Demokrat Saan

Mustopa mengajak berpolitik itu bagian dari ibadah. Karena itu perlu dilakukan dengan cara-cara yang baik, damai dan dalam memilih pemimpin adalah yang amanah. “Mari kita jadikan tanggal 9 April ini sebagai momentum kearah kemaslahatan yang lebih baik,” katanya.

Drajat Wibowo dari PAN juga mengajak kepada segenap masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, apapun hasilnya Allah yang menentukan. “Menjadi tugas kita untuk memilih pemimpin yang amanah dan jangan golput,” ia menegaskan.

Sementara itu Ketua Umum Golkar Abu Rizal Bakri mengatakan, mencoblos pada pemilu 9 April menentukan masa depan bangsa ke depan. Bangsa Indonesia hingga saat ini telah dipimpin oleh 6 Presiden dari Soekarno hingga SBY dan mereka telah berbuat sebaik-baiknya untuk kemaslahatan bangsa Indonesia.

“Kami disini semua sepakat untuk mewujudkan pemilu damai. Kami juga sepakat bahwa pemilu itu untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia bukan untuk salah satu atau dua parpol saja. Karena itu gunakan hak pilih dengan benar, carilah yang terbaik dengan tujuan Indonesia yang lebih baik,” pungkas ARB. (mp)/foto:andri, iwan armanias, rizka/parle/hr.



Ketua DPR RI Marzuki Alie dan Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman dalam acara Dialog “Semangat Pagi” di TV Parlemen. Foto: Iwan Armanias, Andri/Parle.



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo dan Anggota Komisi V DPR RI Arwani Thomafi dalam acara Dialog “Semangat Pagi” di TV Parlemen. Foto: Naefurodjie, Andri/Parle.



Pengajian Akbar “Damai Indonesiaku” di Masjid Baiturahman DPR RI bersama Ustadz Arifin Ilham dihadiri 7 Pimpinan Parpol, Selasa (8/4) foto: Iwan Armanias, Rizka, Andri/Parle.